PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TENTANG

FASILITASI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA PADA
DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN

Nomor : 400.13.1/615/DP3AP2KB/2024

Nomor : 000.47.2/228/DPK/2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (**MOH. ADNAN DATU ADAM, SE**) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. (**RAMLIN M. HAMID, S.Pd.SD.,M.A.P**) selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggungjawab tentang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penanggungjawab Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan Kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan pemenuhan hak anak dan perempuan yang berhubungan dengan kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi dan ibadah yang terdapat dalam buku-buku bacaan/Literasi yang berkaitan dengan pendidikan anak dan pemberdayaan perempuan dalam wadah pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi; fasilitasi pusat pembelajaran keluarga, tempat ruang bermain ramah anak pada perpustakaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka membantu memberikan informasi tentang literasi bacaan yang diperlukan anak dan perempuan.
- b. Menerima Data dan informasi yang sudah disalurkan ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- c. Bersedia membantu **PIHAK PERTAMA** dalam rangka Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga pada Perpustakaan Kabupaten/Desa.
- d. Bersedia membantu **PIHAK PERTAMA** dalam rangka Penilaian Kabupaten/Kota Layak anak untuk menyediakan Informasi Layak Anak (ILA) dengan menyediakan buku-buku bacaan di setiap pojok baca
- e. Bersedia membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pembentukan kabupaten Layak Anak melalui pemenuhan hak anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, terbuka dan koordinatif.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sesuai mekanisme, prosedur dan aturan

- 3) Perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan pedoman yang sifatnya lebih operasional.
- 4) Perjanjian kerjasama ini secara periodik akan dilakukan evaluasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan terhadap kerjasama dalam mendorong implementasi Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan oleh kedua belah pihak melalui *sharing budget*.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

MOH. ADNAN DATU ADAM, SE

PIHAK KEDUA

RAMLIN M. HAMID, S.Pd.SD.,M.A.P